

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN
ONLINE PADA ERA PANDEMI COVID-19
DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Vharizki Haiqal Ikram

NPP. 29.0298

Asdaf Kabupaten Siak, Provinsi Riau

Program Studi Kebijakan Publik

Email: ikram.vharizki11@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The attack of the Corona Virus (Corona Virus Disease 2019) in 2020 in Indonesia has claimed many lives. This virus spreads very quickly and is deadly. This pandemic requires everyone to limit their daily activities, especially those outside the room. Therefore, a social restriction policy was issued to break the chain of the spread of Covid-19. This restriction also affects the education sector which must continue. **Purpose:** This online learning policy aims as a solution to continue learning even in a pandemic, because even in a pandemic the education sector must be able to continue running. **Method:** This research uses descriptive qualitative method. Data was collected using interview, observation and documentation techniques. Research informants consisted of the Head of Service, head of high school construction, Head of High School, High School Teachers, Parents and High School Students. The data analysis technique was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results:** The results of this study describe that online learning policies have been implemented properly, marked by the fulfillment of all indicators in each dimension in policy implementation according to the theory of Van Meter and Van Horn as follows: Dimensions of Standards and Policy Objectives, Dimensions of Resources, Dimensions of Characteristics of Agents/Bodies Implementers, Dimensions of Inter-Organizational Communication and Confirmation of Implementing Activities/Activities, as well as Dimensions of Social, Economic, and Political Conditions. Furthermore, there are also supporting and inhibiting factors for implementing policies and efforts to optimize this online learning policy. **Conclusion:** Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of online learning policies in the era of the Covid-19 pandemic in Pekanbaru City, Riau Province has been carried out, and supporting and inhibiting factors were found as well as efforts to optimize them. Furthermore, suggestions and recommendations were put forward: first, to improve coordination with the government and related elements in monitoring the development of Covid-19 in Riau Province. Second, coordinate with the Covid-19 Task Force Team and adjust learning policies if deemed possible. Third, provide training to teachers on variations in learning models. And Fourth, carry out real and clear socialization to the community.

Keywords: Implementation, *Online Learning*, High School

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Serangan Virus Corona (Corona Virus Disease 2019) pada tahun 2020 di Indonesia telah memakan banyak korban jiwa. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan mematikan. Pandemi ini menuntut setiap orang untuk membatasi aktivitas sehari-hari terutama yang berada di luar ruangan. Maka dikeluarkan kebijakan pembatasan sosial guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pembatasan ini turut mempengaruhi sektor pendidikan yang harus tetap berlangsung. **Tujuan:** Kebijakan pembelajaran *online* ini bertujuan sebagai solusi untuk tetap dapat melangsungkan pembelajaran meskipun dalam keadaan pandemi, karena meskipun dalam keadaan pandemi sektor pendidikan harus dapat tetap berjalan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Kepala Sekolah Menengah Atas, Guru SMA, Orangtua siswa dan Siswa SMA. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa kebijakan pembelajaran *online* sudah terimplementasi dengan baik, ditandai dengan dipenuhinya seluruh indikator pada setiap dimensi dalam pelaksanaan kebijakan menurut teori dari Van Meter dan Van Horn sebagai berikut: Dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan, Dimensi Sumber Daya, Dimensi Karakteristik Agen/ Badan Pelaksana, Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas/ Aktivitas Pelaksana, serta Dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik. Selanjutnya juga terdapat faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dan upaya untuk mengoptimalkan kebijakan pembelajaran *online* ini. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah terlaksana, dan ditemukan faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengoptimalkannya. Selanjutnya diajukan saran dan rekomendasi: pertama, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah serta unsur terkait dalam memantau perkembangan Covid-19 di Provinsi Riau. Kedua, melakukan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 dan menyesuaikan kebijakan pembelajaran jika dianggap sudah memungkinkan. Ketiga, memberikan pelatihan kepada guru tentang variasi model belajar. Dan Keempat, melakukan sosialisasi secara nyata dan jelas kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Pembelajaran *Online*, Sekolah Menengah Atas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh ujian, sebuah virus berbahaya menyebar di Indonesia dan dunia pada umumnya. Virus tersebut dikenal dengan Corona Virus Diseased 2019 atau sering disebut dengan Covid-19 ini termasuk virus yang sangat berbahaya dan mematikan karena menyebabkan orang yang terpapar sangat menderita. Salah satu gejala dari virus Covid-19 ini adalah pneumonia yakni infeksi yang menyerang jaringan paru-paru serta saluran napas dan menempel pada saluran pernapasan dengan tingkat mutasi yang sangat tinggi. Selanjutnya WHO dalam situs resminya who.int, mengambil langkah konkret dan mengumumkan bahwa Covid-19 menular dari satu individu ke individu lainnya. Pandemi ini mengharuskan setiap orang untuk membatasi aktivitasnya sehari-hari, terkhusus bagi aktivitas yang berada di luar ruangan demi mengurangi angka penyebaran Covid-19. Sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam penanganan Covid-19, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), peraturan ini menjelaskan mengenai pembatasan sosial berskala besar dapat diterapkan apabila jumlah kasus baru atau jumlah kematian mengalami peningkatan yang

signifikan. Pemberlakuan pembatasan sosial bersekala besar secara tidak langsung merubah perilaku masyarakat, karena mengharuskan segala aktivitas masyarakat dilaksanakan dari rumah, maka segala kegiatan baik pekerjaan sampai dengan pendidikan beralih menggunakan fasilitas teknologi berbasis digital. Pandemi Covid-19 mempengaruhi banyak sektor diantaranya, sektor ekonomi, pariwisata dan sektor pendidikan dan beralih kepada penggunaan teknologi digital. Dahulu sebelum adanya pandemi penggunaan teknologi digital hanya sebatas untuk mengisi waktu luang atau untuk mencari informasi semata, sementara saat ini teknologi berubah menjadi sebuah kebutuhan untuk keperluan sehari-hari. 3 Pemanfaatan teknologi di masa pandemi hampir digunakan diseluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek pendidikan.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus (Covid-19) pada satuan pendidikan. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan menggunakan moda (daring) yang juga dikenal dengan istilah Belajar Dari Rumah (BDR). Pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring termasuk salah satu model pembelajaran yang memanfaatkan koneksi jaringan sebagai media komunikasi antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Pembelajaran daring secara spesifik mengintegrasikan teknologi elektronika dan jaringan internet yang mampu menjangkau kelompok 5 sasaran yang lebih luas kapanpun dan dimanapun tanpa terhalang ruang dan waktu. Pola pembelajaran daring dinilai lebih memungkinkan dan pilihan yang tepat untuk diterapkan pada pembelajaran dimasa pandemi ini sehingga segala aktivitas pembelajaran harus tetap berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tuntutan kurikulum namun tetap disesuaikan dengan keadaan dan fluktuasi pandemi Covid-19 menuju adaptasi kenormalan baru (New Normal). New normal merupakan suatu adaptasi tatanan kehidupan baru yang berorientasi pada perilaku hidup sehat dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, serta menjaga jarak dan menjauhi keramaian.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pembelajaran *Online* Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Permasalahan yang terjadi yakni masih ada ketimpangan ketersediaan jaringan internet di sekolah antar satu dengan lainnya. Hal tersebut berdasarkan data sebaran ketersediaan jaringan internet di sekolah se-Kota Pekanbaru. Selain permasalahan di atas, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yaitu nilai akreditasi sekolah turut mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di satuan Pendidikan. Beberapa pentahapan yang mesti dilakukan dalam rangka penerapan pembelajaran Jarak Jauh sebagai langkah digitalisasi pembelajaran tingkat Sekolah Menengah Atas dengan model daring di Kota Pekanbaru antara lain yaitu menyiapkan data serta regulasi pendukung, penentuan target peserta dan konsep PJJ, pembentukan tim pelaksana dan pengorganisasian kegiatan di tiap-tiap bidang, merancang monev yang dapat dilaksanakan secara virtual, hingga penyusunan anggaran untuk pembelajaran daring.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Pertama penelitian Medina N. A. P. (2020), berjudul “Blanded Learning Sebagai Sarana Optimalisasi Pembelajaran Daring Di Era New Normal”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembelajaran daring dengan metode blanded learning di era new normal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi proses pembelajaran pada era pandemi Covid-19 saat ini dapat lebih terukur dan efektif jika diterapkan dengan metode blanded learning yang mengabungkan antara strategi sinkron dengan

asninkron dengan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyajian materi digital, bimbingan atau diskusi bersama guru, kegiatan praktik, hingga evaluasi pembelajaran dalam bentuk ujian. Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh A. Irawan R. pada tahun 2020 ini berjudul “Kebijakan Pendidikan Di Era New Normal”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyelenggaraan pembelajaran *online* (daring) di masa new normal di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yakni diperlukan kerja keras dalam menerapkan kebijakan terkhusus bidang pendidikan dan memerlukan perencanaan yang matang serta implementasi kebijakan yang baik. Selanjutnya diperlukan koordinasi bersama unsur terkait demi terwujudnya implementasi yang baik. Dan pihak sekolah juga harus menyiapkan standarisasi protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Penelitian ketiga adalah penelitian oleh Rifa A. F. yang berjudul “Pembelajaran Daring dan Kebijakan New Normal Pemerintah” ini dilangsungkan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam rangka mengidentifikasi pembelajaran daring untuk menghindari terpaparnya virus Covid-19 pada era new normal. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dimasa new normal ini dunia pendidikan harus mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk menunjang efektivitas pembelajaran. Pendidikan tanpa memanfaatkan penggunaan teknologi informasi akan menjadi lemah terutama dibidang mutu. Dan yang terakhir yakni penelitian oleh Tya A. P. D. dan Arif S. pada tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Gabus, Kab. Grobogan pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis data interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di SMA N 1 Gabus, Kab. Grobogan selama masa pandemi covid-19 berlangsung secara daring dengan pendampingan dari guru.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni terdapat perbedaan pada fokus penelitian yakni mengenai pembelajaran *online*, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya untuk mengoptimalkan kebijakan. Lokasi yang menjadi tempat Penelitian juga berbeda yang mana penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru provinsi Riau. Kemudian penulis juga menggunakan teori yang berbeda yaitu teori Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dimana dimensi yang digunakan meliputi: Dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan, Dimensi Sumber Daya, Dimensi Karakteristik Agen/ Badan Pelaksana, Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas/ Aktivitas Pelaksana, serta Dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Pembelajaran *Online* Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru. Serta untuk mengetahui upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru

II. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian adalah metode kualitatif dengan model deskriptif. Menurut Creswell dalam Juliansyah Noor (2016:34), mengartikan penelitian kualitatif adalah “suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.” Penelitian ini menuntut peneliti untuk memahami masalah dalam kelompok masyarakat serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat pada keadaan tertentu,

termasuk tentang kegiatan, hubungan, sikap – sikap, pandangan masyarakat dan proses yang sedang berlangsung dan dampak dari sebuah fenomena.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Kepala Sekolah Menengah Atas, Guru SMA, Orangtua siswa dan Siswa SMA. Kemudian Penulis juga melakukan observasi yakni mengumpulkan data dalam sebuah penelitian yang bersumber dari fakta yang diperoleh di lapangan. Serta dokumentasi yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Pembelajaran *Online* Pada Era Pandemi

Pelaksanaan pembelajaran daring di Provinsi Riau khususnya di kota Pekanbaru mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Riau tentang pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi Covid-19. Kemudian diikuti oleh petunjuk teknis tentang pembelajaran daring yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di Provinsi Riau termasuk Kota Pekanbaru. Selanjutnya setiap sekolah mengatur skema pembelajaran daring sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia di tiap-tiap sekolah. Implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau apabila dianalisis berdasarkan teori menurut Van Meter dan Van Horn yakni ditinjau dari dimensi standar dan sasaran kebijakan, dimensi sumber daya, dimensi karakteristik agen/ badan pelaksana, dimensi komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas/ aktivitas pelaksana, dan yang terakhir dimensi kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Disamping kelima dimensi tersebut juga terdapat landasan hukum atau biasa disebut dengan landasan legalistik yang menjadi dasar dari pelaksanaan suatu kebijakan tersebut. Untuk kebijakan pembelajaran *online* atau pembelajaran jarak jauh diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan kondisi lapangan yang penulis peroleh dari observasi langsung serta ditunjang dengan data yang penulis miliki, implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau sudah dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku. Standard Operational Procedure (SOP) yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran *online* ini secara resmi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang merupakan turunan dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan cocok untuk diterapkan pada kondisi pandemi seperti sekarang ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan ini sudah tepat sasaran. Selanjutnya dengan adanya kebijakan pembelajaran *online* ini terbukti dapat mengurangi kerumunan yang diharapkan mampu mencegah penularan virus Covid-19 dan pada akhirnya tujuan untuk mengurangi kerumunan ini dapat tercapai.. pada indikator kecepatan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau selaku pelaksana kebijakan berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan pembelajaran *online* ini sehingga unsur-unsur pelaksana dibawahnya juga merasakan dampak positif dari penerapan kebijakan tersebut, ditunjang dengan indikator SDM yang mumpuni dan ketersediaan fasilitas yang mendukung penerapan kebijakan.

2. Dimensi Sumber Daya

Dimensi sumber daya merupakan salah satu dimensi yang penting dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Sumber daya menyangkut segala potensi yang dimiliki dalam rangka mendukung pengoptimalan implementasi suatu kebijakan. Dalam teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn, dimensi sumber daya meliputi indikator anggaran dan regulasi. Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dicermati dari indikator anggaran tentunya sudah teroptimalisasi dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai pelaksana kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 juga melakukan hubungan kerja sama dengan pihak industri lebih khususnya industri telekomunikasi dalam menyediakan layanan koneksi internet yang baik agar dapat diakses di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau tentunya sudah memiliki regulasi yang jelas dan lengkap hingga petunjuk teknis pelaksanaannya. Adapun regulasi yang digunakan sebagai pedoman dalam implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau berpedoman kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh pasal 1 ayat 37 dan pasal 119 ayat 2, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Dimensi Karakteristik Agen/ Badan Pelaksana

Dimensi selanjutnya adalah karakteristik agen/ badan pelaksana. Kinerja dari implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang tepat serta sejalan dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini berkaitan erat dengan konteks kebijakan yang akan diimplementasikan, karena dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan yang dituntut diimplementasikan dengan ketat dan disiplin, namun tidak menutup kemungkinan pada konteks lain diperlukan karakter agen yang demokratis dan persuasif. Pada dimensi ini memuat dua indikator yang terdiri dari tanggung jawab dan disiplin. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan dapat disimpulkan bahwa indikator tanggung jawab dalam implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau sudah diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam indikator disiplin yang apabila dikaitkan dengan implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, aparat pelaksana mulai dari satuan pendidikan hingga siswa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan serta observasi yang penulis lakukan secara langsung dinilai sudah berhasil. Dimana aparat pelaksana kebijakan sudah memiliki kesadaran untuk mendisiplinkan diri mereka pribadi serta jika dilihat dari persentase kehadiran siswa. Berdasarkan data tersebut dapat dicermati bahwa telah tertanam jiwa kedisiplinan yang dimiliki oleh siswa Sekolah Menengah Atas. Hal ini dibuktikan dengan persentase yang paling besar dari seluruh model pembelajaran yang digunakan pada masa pandemi Covid-19 dengan perolehan angka 72,8% yang kemudian diusul oleh model blended learning dengan 18,3% dan tatap muka terbatas dengan perolehan 9%.

4. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas/ Aktivitas Pelaksana

Dimensi yang keempat adalah komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas/ aktivitas pelaksana. Untuk menciptakan implementasi kebijakan yang efektif, implementor kebijakan harus memahami standar tujuan dengan konkret. Standar dan tujuan harus dapat dikomunikasikan kepada para aparat pelaksana. Dengan adanya kejelasan informasi berdampak pada pelaksana kebijakan

mengetahui apa yang diharapkan darinya sehingga tahu apa yang dapat dilakukannya agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian untuk mencapai suatu implementasi kebijakan yang efektif memerlukan komunikasi antar pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Dalam dimensi ini terdapat dua indikator capaian yakni sarana dan bentuk. Kaitannya dengan implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan pengamatan penulis yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan, pelaksanaan kebijakan ini sudah ditunjang oleh sarana yang memadai. Pola hubungan yang terjadi dalam implementasi kebijakan dapat berbentuk hubungan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Jika kita kaitkan dengan kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau secara jelas dapat kita lihat terdapat dua bentuk hubungan tersebut, yakni vertikal maupun horizontal. Bentuk vertikal dapat kita cermati dari aturan yang dijadikan sebagai landasan legalistik dalam kebijakan ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku pembuat kebijakan (pemerintah pusat) langsung kepada Dinas pendidikan (pemerintah daerah) untuk melaksanakan kebijakan ini, dan kemudian terus-menerus turun kebawah hingga sampai pada pelaksanaan kebijakan di sekolah oleh kepala sekolah dan guru kepada para siswa. Sedangkan hubungan horizontal atau hubungan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat dilihat pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang menjalin kerjasama dengan industri telekomunikasi untuk mendukung ketersediaan jaringan dan bantuan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

5. Dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dimensi terakhir guna mengukur suatu implementasi kebijakan adalah bagaimana lingkungan eksternal mampu mendukung kebijakan publik. Lingkungan eksternal disini menyangkut tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam indikator ini mensyaratkan terciptanya lingkungan eksternal yang kondusif demi keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan tertentu. Pada dimensi ini memiliki indikator lingkungan tempat suatu kebijakan dilaksanakan. Untuk memperoleh kebijakan yang berhasil diperlukan lingkungan yang harus kondusif serta mampu menunjang kebijakan dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif akan dapat mengakibatkan kegagalan implementasi kebijakan. Jika diukur dari aspek dukungan lingkungan eksternal sudah tergolong berhasil. Dimana dalam mengimplementasikan kebijakan ini pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Riau didukung oleh kondisi lingkungan sosial yang kondusif dan senantiasa mendukung segala bentuk program pemerintah yang dikeluarkan demi kepentingan umum. Selanjutnya juga Kota Pekanbaru didukung oleh kondisi ekonomi yang cukup baik dan kondisi politik yang stabil, sehingga ketiga aspek eksternal ini saling berkesinambungan dalam mendukung terwujudnya implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru ini.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pembelajaran *Online* Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, tentunya terdapat permasalahan atau hambatan yang dihadapi di lapangan. Berbagai bentuk hambatan tersebut akan secara otomatis mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun hambatan yang didapati dalam implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru dapat dicermati sebagai berikut:

1. Koneksi Internet yang Lambat

Hal ini tentunya menghambat pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring di Kota Pekanbaru, karena koneksi internet adalah hal pokok yang diperlukan dalam pembelajaran daring. Koneksi internet yang lambat mengakibatkan kesulitan mengakses akun pembelajaran. Jika koneksi

internet lambat tentunya proses pembelajaran terganggu dan apabila pembelajaran terganggu mengakibatkan serapan pembelajaran rendah.

2. Media Pembelajaran yang Cenderung Monoton

Kecenderungan ini terjadi karena akun pembelajaran yang digunakan selalu sama dan tidak bervariasi. Selain karena penggunaan akun belajar, pengaturan penggunaan akun sesuai jadwal yang telah ditetapkan ternyata juga dapat menimbulkan kebosanan.

3. Kesulitan Dalam Memantau Perilaku Siswa

Dengan adanya pembelajaran *online* ini menyebabkan guru kesulitan dalam memantau sikap siswa akibat adanya perbedaan tempat dan jarak dalam kegiatan pembelajaran yang dahulunya diselenggarakan di dalam kelas dengan kontrol penuh dari guru, kini harus dipaksa dengan jarak yang jauh dan tempat yang berbeda akibat adanya pandemi Covid-19 ini.

4. Serapan Pembelajaran Rendah

Dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini terdapat kendala dalam penyerapan materi pembelajaran. Kendala ini dirasakan oleh seluruh komponen baik guru maupun siswa. Dalam pelaksanaannya siswa kesulitan untuk memahami pembelajaran dan ternyata guru pun juga mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran.

Selain hambatan sebagaimana yang tertera diatas, terdapat juga faktor pendukung yang mendukung terselenggaranya implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Adanya Dukungan dari Industri

Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah menjalin kerjasama dengan industri terkait untuk menunjang proses pembelajaran daring. Dengan adanya kerjasama dengan pihak industri ini diharapkan mampu membantu pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring ini dan dapat memicu semangat belajar siswa dalam menimba ilmu pembelajaran.

2. Ketersediaan Jaringan di Sekolah

Dengan adanya ketersediaan jaringan internet yang ada di sekolah dapat membantu guru dan siswa dalam pembelajaran daring. Dengan adanya koneksi tersebut memudahkan siswa mendapatkan jaringan yang baik dan stabil untuk melangsungkan pembelajaran. Meskipun ada kebijaksanaan lokal yang diambil oleh kepala sekolah dengan mengizinkan siswa datang untuk menggunakan jaringan tidak terlepas dari tujuan untuk memudahkan siswa untuk memperoleh pendidikan.

3. Bantuan Kuota Kemendikbud

Dengan adanya bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat terasa manfaatnya bagi para siswa. Yang dahulu kuota harus dibeli sendiri oleh siswa dengan harga yang cukup tinggi, sekarang setelah mendapat bantuan ini siswa tidak perlu lagi membeli kuota untuk belajar.

3.3 Upaya Untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pembelajaran *Online* Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi kebijakan pembelajaran online pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan Provinsi Riau melakukan berbagai upaya agar kebijakan pembelajaran daring ini dapat berjalan dengan maksimal, diantaranya:

1. Melakukan Kerjasama dengan Kepala Sekolah

Dengan adanya kerjasama ini mensyaratkan setiap sekolah untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya juga dengan adanya kerjasama ini memudahkan Dinas Pendidikan dalam memantau jalannya pembelajaran daring dan kemudian jika ditemui hal yang tidak sesuai dengan ketentuan maka dapat di proses sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

2. Melakukan Sosialisasi Kebijakan Kepada Masyarakat

Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai cara, yaitu sosialisasi langsung, seminar *online*, dan pemanfaatan media sosial agar masyarakat mendapatkan informasi serta pengetahuan terkait pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring ini. Sosialisasi ini dilakukan dengan kerjasama bersama pihak sekolah, sehingga setiap warga sekolah memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan kebijakan.

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala

Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring ini adalah dengan melakukan monitoring langsung ke sekolah-sekolah serta melakukan evaluasi terkait pelaksanaannya. Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui keadaan langsung di lapangan, sehingga pelaksanaan kebijakan pembelajaran *online* ini dapat diamati secara langsung dan konkret. Apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya selanjutnya dapat di evaluasi dan ditemukan solusi untuk mengatasinya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah terlaksana, ditandai dengan telah terpenuhinya segala indikator dari setiap dimensi dalam pelaksanaan kebijakan. Pada dimensi standar dan tujuan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau menetapkan standar pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung dengan sikap responsif dari pelaksana kebijakan, serta sumberdaya dan fasilitas yang memadai. Selanjutnya pada dimensi sumber daya bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah mengoptimalkan penggunaan anggaran yang transparan serta berpedoman pada kebijakan yang berlaku. Pada dimensi karakteristik agen atau badan pelaksana, Dinas Pendidikan telah melaksanakan kebijakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai prosedur. Dalam dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dilihat dari terpenuhinya indikator sarana dengan wujud adanya koordinasi antar pihak dalam bentuk vertikal maupun horisontal. Dan yang terakhir pada dimensi kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ditandai dengan terciptanya lingkungan yang kondusif dalam pelaksanaan kebijakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Pembelajaran *Online* Pada Era Pandemi Covid19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1 Implementasi kebijakan pembelajaran *online* pada era pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah terlaksana, ditandai dengan telah terpenuhinya segala indikator dari setiap dimensi dalam pelaksanaan kebijakan. Pada dimensi standar dan tujuan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau menetapkan standar pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung dengan sikap responsif dari pelaksana kebijakan, serta sumberdaya dan fasilitas yang memadai. Selanjutnya pada dimensi sumber daya bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah mengoptimalkan penggunaan anggaran yang transparan serta berpedoman pada kebijakan yang berlaku. Pada dimensi karakteristik agen atau badan pelaksana, Dinas Pendidikan telah melaksanakan kebijakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai prosedur. Dalam dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dilihat dari terpenuhinya indikator sarana dengan wujud adanya koordinasi antar pihak dalam bentuk vertikal maupun horisontal. Dan yang terakhir pada dimensi kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ditandai dengan terciptanya lingkungan yang kondusif dalam pelaksanaan kebijakan.

4.2 Adapun faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pembelajaran *online*, yakni:

- a. Koneksi internet yang lambat
- b. Media pembelajaran yang cenderung monoton
- c. Kesulitan dalam memantau perilaku siswa
- d. Serapan pembelajaran rendah

Selain itu, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pembelajaran *online*, diantaranya:

- a. Adanya dukungan dari industri
- b. Ketersediaan jaringan di sekolah
- c. Bantuan kuota Kemendikbud

4.3 Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pembelajaran *online* tersebut, diantaranya:

- a. Melakukan kerjasama dengan kepala sekolah
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kebijakan Pembelajaran *Online* Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau serta seluruh pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahab, SoIichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Pekanbaru Dalam Angka 2021
- Cresswell, J. W. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, ed.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gusty, S. dkk. 2020. Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19. Jakarta: Yayasan Kita Menulis
- Hamdi, M. 2014. Metodologi Penelitian Administrasi. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Islamy, I. 1992. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution. 2013 Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Noor, J. 2016 Metodologi penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nugroho, R. 2014. Public Policy; teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Rosenbloom, H. 2002. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law In The Public Sector. New York: Mc-Graw_Hill
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
- Toenlio, A. J. E. 2016. Teori dan Filsafat Pendidikan. Malang: Gunung Samudra
- Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: PT. Buku Seru.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh

C. Jurnal

- Dewi, T. A. P & A. Sadjiarto. 2021. “Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Basicedu vol.4, Kampar: UPTK
- Firyal, R. A. 2020. “Pembelajaran Daring dan Kebijakan New Normal Pemerintah”. FKIP Universitas Lambung Mangkurat
- Purnama, M. N. A. 2020. “Blended Learning Sebagai Sarana Optimalisasi Pembelajaran Daring Di Era New Normal”. Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme Vol. 2, Ponorogo: INSURI
- Rafsanjani, A. I. 2020. “Kebijakan Pendidikan Di Era New Normal”. FKIP Universitas Lambung Mangkurat

D. Sumber – Sumber Lain

<https://corona.riau.go.id/>. Data Kasus Covid-19 di Provinsi Riau. Sabtu, 18 September 2020

